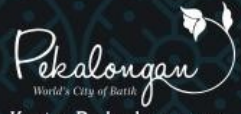




**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN**



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



Kota Pekalongan
City Of Crafts | Designated UNESCO
and Folk Art | Creative City in 2014

BUKU RENSTRA RENCANA STRATEGIS

2021-2026

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PEKALONGAN**

**DISUSUN ATAS DASAR
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021-2026**



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Majapahit Nomor 5 Pekalongan (0285) 421243 – 7998152
website: pekalongankota.go.id ; kominfo.pekalongankota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PEKALONGAN

NOMOR : 900/ TAHUN 2022

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (9) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa penambahan kegiatan baru dalam RKPd ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam renstra Perangkat Daerah.
- b. untuk melaksanakan Pasal 151 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 97 Ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun 2021-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu ditetapkan dalam keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Dinas komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun 2021-2026;
- Mengingat :1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2025;
 8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029;
 9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025;
 10. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFROMATIKA KOTA PEKALONGAN TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PEKALONGAN TAHUN 2021-2026;**

KESATU : Mengesahkan Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun 2021 – 2026, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun 2021 – 2026.

- KEDUA : Perubahan Rencana Strategis ketiga Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun 2021-2026;
- KETIGA : Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2021 dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026;
- KEEMPAT : Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 dapat disesuaikan dengan perkembangan dan dinamika lingkungan strategis.
- KELIMA : Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan.
- KEENAM : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan
Pada tanggal Januari 2022



Pembina Tingkat I
NIP. 196605161986031007

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Teknologi informasi pada saat ini digunakan sebagai daya ungkit efektivitas dan efisiensi. Perkembangannya yang begitu pesat memungkinkan untuk diselaraskan dengan banyaknya proses bisnis yang masih belum optimal. Salah satu perkembangan teknologi informasi yang saat ini dapat dirasakan yaitu memudahkan beraktivitas dalam melihat berita dan mencari berbagai informasi. Selain teknologi informasi yang berkembang, ada hal lain yang perlu menjadi perhatian yaitu data dan informasi serta keamanannya. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang begitu pesat telah mengiringi proses perubahan tatanan dunia dari yang bersifat terbatas menjadi tanpa batas. Penyajian informasi melalui teknologi informasi tidak bisa lepas dari penyajian data dan informasi yang akurat dan akuntabel. Selain itu, untuk menghindari adanya gangguan pihak luar yang tidak bertanggungjawab perlu diiringi dengan peningkatan kualitas keamanan informasinya. Juga dalam mengantisipasi tren perkembangan media massa dan sosial berbasis teknologi digital di kalangan masyarakat yang kian dinamis. Dalam hal ini peningkatan kinerja dalam pengelolaan informasi publik menjadi titik sentral barometer dalam pelayanan informasi publik yang bergulir dan makin interaktif. Maka fungsi-fungsi koordinasi dan komunikasi lintas pemerintah dan swasta serta masyarakat menjadi kebutuhan mutlak. Sejalan dengan itu terus dikembangkan pola informasi publik yang makin efektif sebagai bahan koreksi peningkatan pelayanan informasi dimasa yang akan datang.

1.2. Landasan Hukum

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra

Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD,

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinkominfo adalah:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota- Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peratruan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjangm Daerah danRencana Pembangunan Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2021 – 2026
6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Sususnan Perangkat Daerah Kota Pekalongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 dan

dijabarkan dalam Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

1.1. Maksud dan Tujuan

1. Maksud :

Renstra disusun sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program Walikota yang digambarkan dalam bentuk program dan kegiatan terkait urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian yang harus dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan selama kurun waktu Tahun 2021-2026.

2. Tujuan

Renstra disusun dengan tujuan:

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Pekalongan sebagai penjabaran visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih;
- b. Menerjemahkan visi dan misi Walikota ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan dengan berpedoman kepada RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026;
- c. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026.

1.2. Sistematika Penyusunan

Sistematika Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota

ekalongan Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan.

BAB II Gambaran Pelayanan Dinkominfo

Bab ini memuat tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu untuk diselesaikan.

BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinkominfo

Bab ini menggambarkan tentang identifikasi permasalahan; telaah visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota terpilih; telaah Renstra K/L dan Renstra Dinkominfo Kota, telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan KLHS pada RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 serta penentuan isu-isu strategis yang mempengaruhi permasalahan pelayanan terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan

BAB IV Tujuan dan Sasaran Dinkominfo

Bab ini menjelaskan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah, indikator kinerja serta target selama 5 tahun ke depan.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan Dinkominfo

Bab ini menjelaskan strategi dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran dan kebijakan untuk menjadi pedoman strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Dinkominfo

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Dnskominfo

Bab ini menjelaskan indikator kinerja Dinkominfo Kota Pekalongan termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dipilih. Selain itu pada bab ini juga menguraikan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan atau indikator kinerja program pada masing-masing urusan pemerintahan.

BAB VIII Penutup

Bab ini berisikan catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka pelaksanaan kinerja, ketersediaan anggaran (sesuai/tidak sesuai kebutuhan), kaidah-kaidah pelaksanaan kinerja serta rencana tindak lanjut.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINKOMINFO

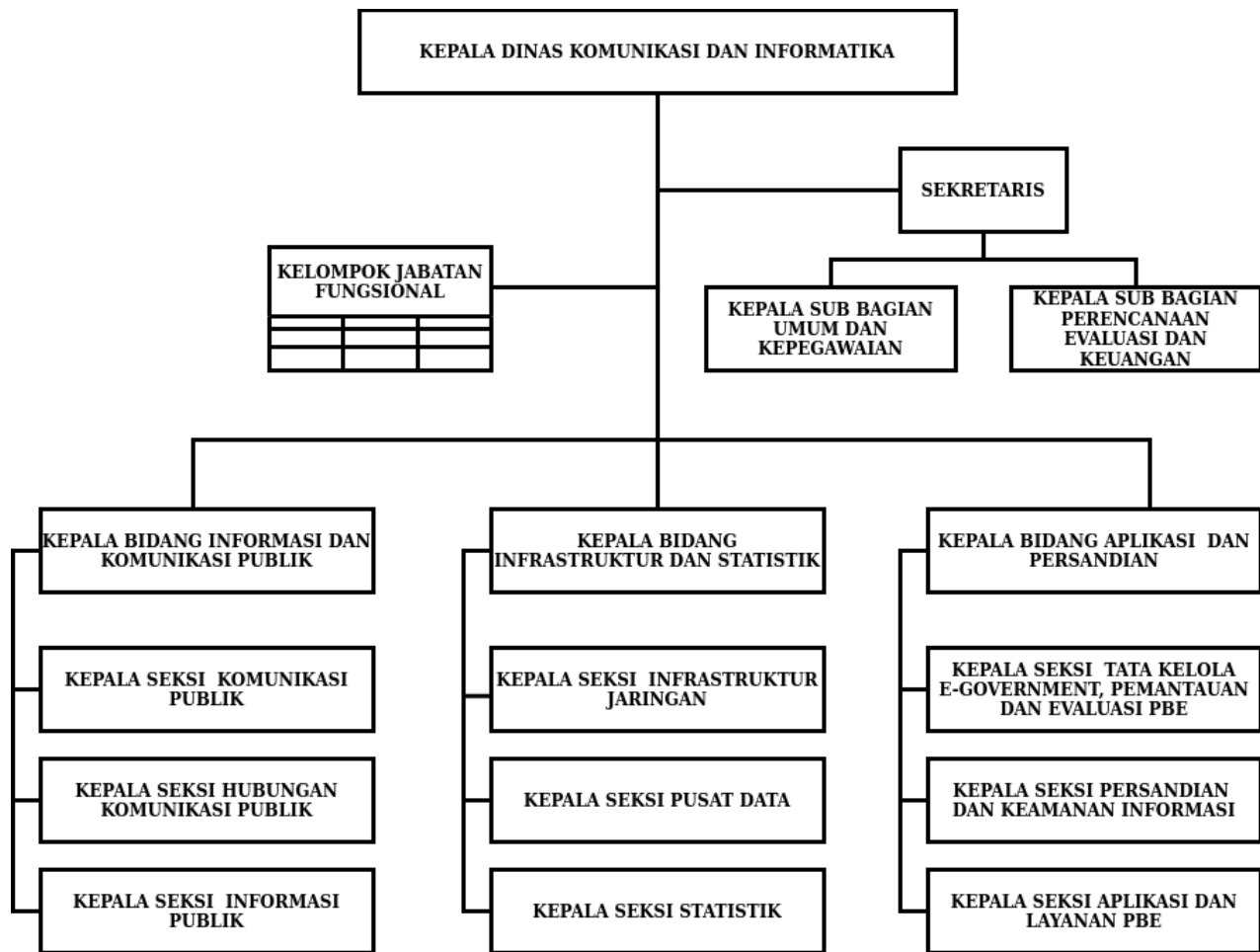
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan dibentuk sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016. Kemudian dalam rangka pembentukan struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah dikeluarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan yaitu tugas pokok Dinkominfo adalah melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah serta mempunyai fungsi:

- a) perumusan dan penetapan sasaran, program bidang Komunikasi dan Informatika:
- b) perumusan kebijakan bidang Komunikasi dan Informatika :
- c) pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang informasi dan komunikasi publik:
- d) pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang infrastruktur dan statistik :
- e) pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang aplikasi dan persandian :
- f) pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan l
- g) pengarahan dan pengkoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP);
- h) pengkoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan
- i) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan terdiri dari Kepala Dinkominfo yang memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, dan membawahi Sekretariat, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang infrastruktur dan Statistik, Bidang Aplikasi dan Persandian serta Kelompok Jabatan Fungsional. Bagan struktur organisasi Dinkominfo Kota Pekalongan dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Sebagaimana Gambar 2.1, masing-masing unsur dari organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Sekretariat

a. Tugas

1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum dan

kepegawaian, pengkoordinasian rencana program, kegiatan, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja serta administrasi keuangan.

b. Fungsi:

- 1) Perumusan sasaran, program dan kegiatan dinas;
- 2) Pengkoordinasian penyusunan kebijakan dinas;
- 3) Pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang-bidang;
- 4) Pengkoordinasian penyusunan laporan dan evaluasi capaian kinerja, sasaran, program dan kegiatan;
- 5) Pembinaan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, bahan kerjasama, sarana prasarana teknologi informasi, perpustakaan dan kearsipan;
- 6) Pengkoordinasian pengelolaan, penatausahaan dan pelaporan bidang keuangan;
- 7) Pengkoordinasian pengelolaan data dan informasi;
- 8) Pengkoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- 9) pengkoordinasian penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP);
- 10) Pengkoordinasian pelaporan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB);
- 11) Pengendalian, pembinaan, [engevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan ; dan
- 12) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang, tugas dan fungsinya.

2. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

a. Tugas:

1. Bidang Informasi dan Keamanan Publik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
2. Bidang Informasi dan Keamanan Publik mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan pengelolaan bimbingan teknis dari supervisi, serta pemanataan, evaluas dan pelaporan dibidang pengelolaan informasi

dan komunikasi publik .

b. Fungsi:

1. Perumusan program kerja sesuai bidang informasi dan komunikasi publik;
 2. Perumusan bahan kebijakan bidang informasi dan komunikasi publik;
 3. Pengkoordinasian pengelolaan informasi publik;
 4. Pengkoordinasian pengelolaan komunikasi publik;
 5. Pengkoordinasian pengelolaan hubungan komunikasi publik;
 6. Penyelenggaraan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kegiatan;
 7. Perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan / atau Standar Pelayanan (SP) sesuai bidang tugasnya;
 8. Pengendalian, pembinaan, pengevaluasua, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
 9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya
- c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu Seksi Informasi Publik, Seksi Komunikasi Publik, dan Seksi Hubungan Komunikasi Publik

3. Bidang Infrastruktur dan Statistik

a. Tugas:

1. Bidang Infrastruktur dan Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
2. Bidang Infrastruktur dan Statistik mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang Infrastruktur dan Statistik sesuai dengan Peraturan Walikota.

b. Fungsi

1. Perumusan program kerja bidang infrastruktur dan statistik;
2. Perumusan bahan kebijakan bidang infrastruktur dan statistik;
3. Pengkoordinasian layanan pengembangan intranet;
4. Pengkoordinasian penggunaan akses internet;
5. Pengkoordinasian layanan infrastruktur jaringan dan data center;
6. Pengkoordinasian dan pengelolaan Pusat Data dan Pemulihan Bencana ;

7. Penyelenggaraan pengembangan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah;
 8. Pengkoordinasian penyelenggaraan pengelolaan Satu Data Terpadu Daerah;
 9. Pengkoordinasian penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data serta publikasi data statistik daerah;
 10. Perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
 11. Pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
 12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- c. Bidang Infrastruktur dan Statistik terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu Seksi Infrastruktur Jaringan, Sekdi Pusat Data dan Seksi Statistik.

4. Bidang Aplikasi dan Persandian

a. Tugas:

1. Bidang Aplikasi dan Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
2. Bidang Aplikasi dan Persandian mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang Aplikasi dan Persandian sesuai dengan Peraturan Walikota.

b. Fungsi:

1. Perumusan program kerja bidang aplikasi dan persandian;
2. Perumusan bahan kebijakan bidang aplikasi dan persandian;
3. Pengkoordinasian pelaksanaan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah;
4. Pengkoordinasian pelaksanaan jaringan komunikasi sandi;
5. Pengkoordinasaan pelaksanaan kegiatan layanan aplikasi publik elektronik dan layanan aplikasi administrasi pemerintahan elektronik;
6. Pengkoordinasaan pelaksanaan kegiatan layanan aplikasi *Smart City*;
7. Pengkoordinasaan perumusan kebijakan tata kelola PBE;

8. Perumusan beban kebijakan ekosistem kota cerdas;
 9. Pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
 10. Perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standar Pelayanan Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
 11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya ;
- c. Bidang Aplikasi dan Persandian terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu Seksi Tata Kelola, Pemantauan dan Evaluasi PBE, Seksi Persansian dan Keamanan Informasi dan Seksi Aplikasi dan Layanan PBE.

2.2. Sumber Daya

2.2.1. Kondisi Kepegawaian

Jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan sampai dengan Agustus 2021, tercatat sebanyak 21 orang. Keadaan pegawai berdasarkan pendidikan, posisi jabatan dan golongan adalah sebagai berikut:

a. Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Gambaran mengenai pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan berdasarkan tingkat pendidikan kondisi Desember 2021 sebagaimana Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan

NO	BIDANG	PENDIDIKAN (Orang)							TOTAL (Orang)
		SD	SLTP	SLTA	SAR MUD	S-1	S-2	S-3	
1.	Sekretariat	-	-	-	-	4	-	-	4
2.	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	-	-	1	-	2	1	-	4
3.	Bidang Infrastruktur dan Statistik	-	-	-	2	3	-	-	5
4.	Bidang Aplikasi dan Persandian	-	-	1	-	4	1	1	7
5.	Jabatan Fungsional	-	-	-	1	1	-	-	2
6.	Non PNS	-	-	5	4	23	1	-	33
Jumlah (Orang)		-	-	7	7	37	2	1	54

Sumber: Dinkominfo Kota Pekalongan per Agustus 2021

Berdasarkan Tabel 2.1, diperoleh gambaran bahwa tingkat pendidikan terendah adalah SLTA (12,9%), Sarmud(12,9%), S1 (62.9%), S2 (9.25%), dan tertinggi S3 (1,85%).

b. Pegawai berdasarkan jenis kelamin

Komposisi pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan berdasarkan jenis kelamin (per Agustus 2021), dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan
Berdasarkan Jenis Kelamin.

NO	BIDANG	JENIS KELAMIN (Orang)		TOTAL (Orang)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	Sekretariat	2	2	4
2.	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	4	0	4
3.	Bidang Infrastruktur dan Statistik	4	2	6
4.	Bidang Aplikasi dan Persandian	5	2	7
8.	Jabatan Fungsional Tertentu	-	-	-
9.	Non PNS	20	13	33
Total (Orang)		35	19	54

Sumber: Diinominfo Kota Pekalongan per Agustus 2018.

Berdasarkan Tabel 2.2, diperoleh gambaran bahwa jumlah pegawai laki-laki (62,96) lebih banyak dibanding perempuan (37,04). Apabila dilihat dari sebarannya hampir di semua bidang jumlah pegawai laki-laki lebih banyak dibanding perempuan.

c. Pegawai berdasarkan golongan

Berdasarkan golongan, komposisi pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan kondisi Agustus 2021 terbanyak adalah pegawai Golongan III (70,3%). Secara lengkap komposisi pegawai Dinkominfo berdasarkan golongan dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Pekalongan Berdasarkan Golongan.

NO	BIDANG	GOLONGAN (Orang)				Total (Orang)
		I	II	III	IV	
1.	Sekretariat	-	-	3	1	4
2.	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	-	-	4	-	4
3.	Bidang Infrastruktur dan Statistik	-	1	4	1	6

NO	BIDANG	GOLONGAN (Orang)				Total (Orang)
		I	II	III	IV	
4.	Bidang Aplikasi dan Persandian	-	-	5	2	7
8.	Jabatan Fungsional Tertentu	-	-	-	-	-
9.	Non PNS	-	9	24	-	33
Jumlah (Orang)		-	10	40	4	54
Persentase (%)		-	18,5%	70,3%	11,1%	100%

Sumber: Dinkominfo Kota Pekalongan per Agustus 2021

2.2.1. Kondisi Prasarana dan Sarana

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Dinkominfo Kota Pekalongan dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Prasarana dan Sarana
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan

NO	NAMA BARANG	JUMLAH UNIT BARANG	KETERANGAN
1	AC	24	
2	ALAT PEMADAM / HIDRAN	12	
3	PC UNIT/CPU/TABLET	81	
4	PENGHANCUR KERTAS	122	
5	BAND KAS / KARDEK BESI	2	
6	KURSI/SOFA	194	Kursi kerja, Kursi rapat, Kursi komputer.
7	LEMARI / RAK	19	
8	KAMERA/CAMCORDER/TRIPOD	11	
9	CARD READER	3	
10	PRINTER/SCANNER	25	
11	EXHAUST FAN / KIPAS ANGIN	1	
12	HARDISK EXTERNAL	60	
13	FILLING BESI / CABINET	22	
14	GAMBAR PRESIDEN/PIGURA/LAMBANG GARUDA/BAGAN/ TIANG BENDERA	1	

NO	NAMA BARANG	JUMLAH UNIT BARANG	KETERANGAN
15	SERVER	26	
16	JAM	0	
17	KACA HIAS	0	
18	SALON/SPEAKER/TOA/AUDIO/MIXER/MIC/ SOUNDSYSTEM/DVD	10	
19	UPS/STABILISATOR	29	
20	TELEPON/FAXCIMILE	5	
21	LAMPU HIAS	4	
22	POMPA AIR	1	
23	GORDYN/KARPET	2	
24	TANGGA	1	
25	LAYAR/PROYEKTOR	4	
26	RADIO/REPEATER/ANTENA/HT	2	
27	LAPTOP	14	
28	MESIN KETIK	2	
29	MEJA	145	Meja kerja, Meja rapat, Meja komputer, Meja telepon.
30	MESIN ABSENSI	7	
31	MESIN PHOTOCOPY	0	
32	TELEVISI/LCD/BRACKET	8	
33	WHITEBOARD	10	
34	MEJA KURSI TAMU	4	
35	HANDPHONE	1	
36	ORGAN MUSIK	1	
37	CCTV	22	
38	KENDARAAN RODA 4	5	
39	KENDARAAN RODA 2	15	
40	GENSET	3	
41	ASET TAK BERWUJUD & VIRTUAL REALITY	7	Aplikasi, Virtual Reality

Sumber: Dinkominfo Kota Pekalongan per Agustus 2021.

2.2 Kinerja Pelayanan Dinkominfo

Gambaran kinerja Dinkominfo Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 diperoleh dari Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk Tahun 2020, 2021 dan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinkominfo Kota Pekalongan Tahun 2020 serta evaluasi s.d. triwulan II 2021 untuk gambaran kinerja Tahun 2021-2026. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.5 dan Tabel 2.6.

Tabel T.C-23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan.

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021 s/d T-2	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Urusan Komunikasi dan Informatika																		
1.1	<i>Program Pengelolaan Pengaduan dan Aspirasi Masyarakat dan Penguatan KIP</i>																		
a.	Persentase OPD Menerapkan KIP dengan Kategori "Cukup Informatid/ Baik".			0	0	0	21.43	28.57	52.63	0	29.03	48.38	96.77	NA	0	0	44.29	29.52	NA
b.	Persentase OPD yang melakukan Pengelolaan Pengaduan / Aspirasi Masyarakat.			0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	100	100	100
1.2	<i>Program Pengelolaan Desiominasi Informasi, Kerjasama Media dan Penguatan Sumber Daya Komunikasi Publik</i>																		
a.	1 : Persentase OPD / Urusan Pemerintahan/ Sektor Pembangunan yang tercakup dalam layanan Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik			0	0	0	79.07	88.37	100	100	100	100	100	100	0	0	79.07	88.37	100
b.	2 : Persentase Kelurahan yang memiliki / mengembangkan Sumber Daya Komunikasi Publik Sebagai Jejaring Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik.			0	0	0	59.26	62.96	66.67	21.42	21.42	46.63	71.42	71.42	0	0	78.68	93.34	100
	Persentase OPD Menerapkan KIP dengan Kategori "Cukup Informatid/ Baik"			0	0	0	21.43	28.57	38.10	29.03	48.38	96.77	93.59	NA	0	0	73.82	59.05	NA

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021 s/d T-2	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Persentase OPD yang melakukan Pengelolaan Pengaduan / Aspirasi Masyarakat.			0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	81.48	0	0	100	100	100
1.3	Program Pengembangan Infrastruktur TIK																		
a.	1 : Persentase OPD, Kelurahan dan Kecamatan dalam layanan infrastruktur dan JaringanTIK/ Fiber Optik (FO)				81.67	88.30	93.33	96.67	100	79.00	81.67	88.30	100	93.93	96.73	92.49	94.61	100	100
	2 : Persentase Cakupan dalam layanan infrastruktur dan JaringanTIK/ Fiber Optik (FO) Klaster Kesehatan (Puskesmas, RS, Pustu dll)				28.89	31.11	33.33	35.56	37.78	21.70	28.89	31.11	100	88.23	75.00	92.86	93.33	100	100
	3 : Persentase Cakupan layanan infrastruktur dan JaringanTIK/ Fiber Optik (FO) Klaster Pendidikan (Sekolah negeri, smp, sd, tk)				17.53	19.59	21.65	24.74	27.84	15.00	17.00	19.00	23.59	23.59	85.56	86.77	87.75	95.35	100
1.5	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi																		
b.	1 : Persentase OPD yang menjalankan layanannya dengan menggunakan Aplikasi/ Sistem Informasi .			61.29	67.74	81.65	87.10	93.55	100.00	74.56	79.00	82.14	100	100	110	96.75	94.30	100	100
	2 : Persentase kelompok masyarakat mendapatkan capacity building TIK untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi.				33.00	50.00	67.00	76.67	100.00	21.42	21.42	46.43	76	100	64.90	42.84	69.29	71.42	25.00
2.	Urusan Statistik																		
2.1	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah																		

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021 s/d T-2	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
a.	1 : Persentase data statistik sektoral yang tersusun	-	-		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase produsen data (OPD) yang berkontribusi daam sistem satu data				0	10.00	15.00	20.00	25.00	10	10	15	20		0	100	100	100	100
	Persentase OPD yang melakukan pengumpulan dan publikasi data sektoral (profil OPD)				0	100.00	100.00	100.00	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3.	Urusan Persandian																		
3.1	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintahan																		
a.	1 : Persentase berita daerah yang lancar, aman dan terjaga kerahasiannya	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Dinkominfo Kota Pekalongan per Agustus 2021.

Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Th. 2016-2021

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas & Fungsi SKPD	Anggaran Pada Tahun ke- Rp. (000)					Realisasi Anggaran Tahun Rp. (000)					Ratio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			(18)	(19)
1.	Urusan Komunikasi dan Informatika																	
1.1	<i>Program Pengelolaan Pengaduan dan Aspirasi Masyarakat dan Penguatan KIP</i>	9.011.756	10.671.595	8.299.731	8.014.895	13.400.000	7.881.613	8.946.502	7.859.446	7.634.215	1.303.054	87,46	83,83	94,70	95,25	9,72	10%	-36%
1.2	<i>Program Pengelolaan Desiominasi Informasi, Kerjasama Media dan Penguatan Sumber Daya Komunikasi Publik</i>	7.908.996	9.445.586	7.895.255	4.410.819	5.077.000	6.503.854	7.814.753	6.532.436	4.077.229	780.284	82,23	82,73	82,74	92,44	15,37	-10%	-41%
1.3	<i>Program Pengembangan Infrastruktur TIK</i>	465.000	400.035	316.500	560.000	560.000	404.093	359.748	277.577	438.214	33.039	86,90	89,93	87,70	78,25	5,90	5%	-47%
1.4	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	-	486.418	699.750	750.000	1.223.500	-	442.207	260.896	713.968	792.266	-	90,91	37,28	95,20	64,75	36%	21%

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas & Fungsi SKPD	Anggaran Pada Tahun ke- Rp. (000)					Realisasi Anggaran Tahun Rp. (000)					Ratio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			(18)	(19)
2.	Urusan Statistik																	
2.1	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	1.586.000	1.118.000	2.047.580	1.200.000	1.300.000	1.552.410	1.035.882	1.453.064	1.198.545	166.383	97,88	92,65	70,96	99,88	12,80	-5%	-43%
3.	Urusan Persandian																	
3.1	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintahan	-	-	-	285.000	2.500.000	-	-	-	260.945	314.377	-	-	-	91,56	12,58	777%	20%
	Pengembangan sistem keamanan informasi																	
	TOTAL	23.691.752	23.315.349	20.484.986	16.520.714	25.780.500	20.550.832	19.731.403	17.468.636	15.557.908	3.653.874	86,74	84,63	85,28	94,17	14,17	791%	-176%

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pekalongan Tahun 2017-2021(data diolah), Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) 2017 (Audited) dan Penendalian Operasional Kegiatan (POK) TriwulanIII 2021.

iTabel T-C.23

interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan ada/tidaknya kesenjangan/gap pelayanan, pada pelayanan mana saja target telah tercapai, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini, lalu pada pelayanan mana saja target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya. Setelah penyajian Tabel T-C.24, interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah, misalnya prosedur/mechanisme, jumlah dan kualitas personil (sumber daya manusia), progres pelaksanaan program, dan sebagainya. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinkominfo

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Dinkominfo kurun waktu 5 tahun ke depan, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada, guna mempertajam kebijakan pelayanan Dinkominfo untuk mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD.

1. Tantangan

- a. Peningkatan Indeks SPBE berdasarkan PermenpanRB Nomor 59 Tahun 2020,.
- b. Meningkatkan pelayanan intranet baik aplikasi , DRC maupun infratraktur jaringan berbasis Fiber Optic;
- c. Sesuai Perwal Nomor 69 Tahun 2013 tentang Pedoman Infromasi Publik di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan dengan melayani semua permohonan harus diselesaikan secara cepat.
- d. Meningkatkan layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik secara bertahap (pencarian informasi, pengunggahan, pengunduhan dokumen, otomasi pertukaran data, basis data, validasi data, mekanisme pertujuan dan analitik data.
- e. Berdasarkan Peraturan BSSN (Badan Siber Sandi Negara) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan dalam penyelenggaraan elektronik secara bertahap meningkatkan Indeks Kami menuju ISO 27001.

2. Peluang

- a. Peningkatan kebutuhan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, murah dan sederhana.
- b. Kebutuhan pengembangan TIK dalam mewujudkan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Kota Pekalongan.
- c. Kebutuhan pengembangan muatan e-Government sesuai karakteristik daerah di Kota Pekalongan.
- d. Kesadaran masyarakat Kota Pekalongan akan pentingnya statistik sektoral, informasi dan komunikasi.
- e. Kebutuhan pengembangan TIK dalam mewujudkan Digitalisasi Tata Kelola Keamanan Informasi Pemerintahan Kota Pekalongan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Sumber daya Dinkominfo Kota Pekalongan yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Dinkominfo selama kurun waktu 2 tahun ke belakang (Tahun 2020-2021) serta tantangan dan peluang yang ada maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Dinkominfo. Pemetaan permasalahan pelayanan Dinkominfo Kota Pekalongan dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Pemetaan Permasalahan Pelayanan.

NO	MASALAH POKOK (tujuan / sasaran)	MASALAH (program)	AKAR MASALAH (keg / sub keg)
1.	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Informasi Publik	Pemenuhan layanan informasi publik yang cepat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu adanya penyusunan Raperda IKP 2. peningkatan pengelolaan website pekalongankota.go.id dan link berbagai kanal media sosial (facebook, twitter, instagram, youtube) 3. Perlu adanya kerjasama sama dengan KIM Kelompok informasi masyarakat, FK Metra Forum komunikasi media tradisional. 4. perlu adanya penyelesaian terhadap pengaduan masyarakat melalui website lapor.go.id dan call

NO	MASALAH POKOK (tujuan / sasaran)	MASALAH (program)	AKAR MASALAH (keg / sub keg)
			center 112. 5. perlu adanya penyebaran informasi melalui media massa melalui layanan adventorial. 6. Perlu adanya sarana prasarana IKP 7. Perlu adanya jejak pendapat Kepemimpinan Daerah
2	Tingkat kematangan pembangunan aplikasi SPBE	Pemenuhan layanan SPBE (Layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	1. Perlu adanya dokumen sinkronisasi Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik 2. Perlu adanya dokumen kebijakan SPBE 3. Perlu adanya Pusat Data Pemerintahan Daerah 4. Perlu peningkatan pengembangan aplikasi dan proses Bisnis PBE 5. Perlu adanya portal layanan publik dan administrasi pemerintahan. 6. Perlu adanya pelatihan TIK bagi ASN dan masyarakat 7. Perlu diadakannya monitoring dan evaluasi ekosistem SPBE
		Peningkatan kematangan layanan jaringan intra Pemerintah Daerah	1. Perlu peningkatan pembangunan jaringan Fiber Optic 2. Perlu diadakannya pemeliharaan jaringan Batik Net 3. Perlu peningkatan kapasitas Bandwith internet dan layanan Batik.Net

NO	MASALAH POKOK (tujuan / sasaran)	MASALAH (program)	AKAR MASALAH (keg / sub keg)
3.	Tingkat kematangan layanan data terbuka	1. Peningkatan penyediaan data statistik sektoral pada setiap OPD	2. Perlu adanya dokumen database indikator TIK 3. Perlu pengembangan aplikasi satu data 4. Perlu penusunan dokumen data SDTD 5. Perlu adanya dokumen publikasi statistik yang dicetak
4.	Tingkat Keamanan Infomasi	Tingkat kematangan penerapan manajemen keamanan informasi	1. Perlu adanya dokumen kebijakan tata kelola manajemen keamanan informasi 2. Perlu diadakannya penilaian mandiri indeks keamanan informasi 3. Perlu adanya sosialisasi keamanan informasi 4. Perlu adanya lisensi sertifikat elektronik TLS *pekalongankota.go.id 5. Perlu adanya lisensi endpoint security (antivirus) 6. Perlu adanya leaflet promosi keamanan informasi 7. Perlu adanya Sistem Elektronik yang telah memanfaatkan sertifikat elektronik 8. Perlu adanya audit TIK 9. Perlu adanya Perangkat Keamanan TIK khususnya berupa peralatan sandi untuk jaring komunikasi sandi 10. Perlu adanya dokumen Laporan

NO	MASALAH POKOK (tujuan / sasaran)	MASALAH (program)	AKAR MASALAH (keg / sub keg)
			penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang persandian 11. Perlu adanya prosedur persandian

3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekalongan.

Penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan, yang tertuang dalam RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinkominfo yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2021-2026.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, visi pembangunan daerah jangka menengah Kota Pekalongan, adalah:

“Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius”

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 7 (empat) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Religius, Kompeten dan

Produktif Guna Menjawab Tantangan Era Perubahan

3. Mewujudkan Lingkungan Permukiman yang Nyaman
4. Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berdasarkan Prinsip Pembangunan Kota yang Berkelanjutan
5. Membangun Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal
6. Melestarikan Budaya, Kearifan Lokal serta Mengembangkan Tata Kehidupan yang Berakhlaqul Karimah
7. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Governance dan Clean Government

Sedangkan penjabaran operasional untuk mencapai Visi dan Misi Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 tersebut ditetapkan 17 (tujuh belas) Program Unggulan, yaitu :

1. Jaminan akses layanan kesehatan bagi setiap warga;
2. Peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi kelompok rentan (bayi, balita, ibu hamil, manula dan kelompok rentan lain);
3. Jaminan akses pendidikan bagi setiap warga;
4. Memberikan fasilitasi kepada lembaga pendidikan keagamaan dalam upaya meningkatkan kualitas dan religiusitas warga;
5. Membangun sistem database infrastruktur pemukiman;
6. Membangun sistem pengelolaan sampah dan limbah di tingkat pemukiman dan kota;
7. Penanganan rob dan banjir ;
8. Menata dan menambah jumlah ruang publik untuk kegiatan kreativitas dan kegiatan rekreasi warga;
9. Menambah sarana olahraga dan kesenian;
10. Menambah jumlah pasar tradisional dengan konsep modern;
11. Membangun ekonomi kreatif dan digitalpreneurship bagi kalangan muda;
12. Penyediaan jaringan internet gratis;

13. Penataan kawasan pedagang kaki lima sebagai pusat food street;
14. Mengembangkan kegiatan wisata religius dan kegiatan wisata lain;
15. Mengembangkan Pekalongan sebagai pusat kuliner pesisir;
16. Peningkatan kesejahteraan guru madrasah, sekolah swasta, TPQ, madrasah diniyah dan pondok pesantren;
17. Peningkatan kesejahteraan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota Pekalongan sesuai dengan kompetensi dan kinerja

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan daerah Kota Pekalongan tersebut, maka Dinkominfo sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Pekalongan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk merumuskan, melaksanakan, memantau, monitoring dan pelaporan kebijakan dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik, pembangunan teknologi informasi dan komunikasi, penyelenggaraan statistik sektoral, domain instansi penyelenggara negara, persandian, penetapan pola hubungan komunikasi sandi yang memiliki peran penting mendukung pencapaian visi dan seluruh misi pembangunan Kota Pekalongan selama 5 (lima) tahun ke depan.

**Tabel T-B.35.
Keterkaitan Fungsi Dinkominfo dengan Misi Kota Pekalongan 2016-2021**

FUNGSI DINKOMINFO	MISI KOTA PEKALONGAN 2021-2026	PROG UNGGULAN KOTA PEKALONGAN 2021-2026
1. perumusan dan penetapan sasaran, program bidang Komunikasi dan Informatika: 2. perumusan kebijakan bidang Komunikasi dan Informatika: : 3. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang informasi dan	Misi 7: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Governance dan Clean Government	Prog Unggulan 12: Penyediaan jaringan internet gratis;

FUNGSI DINKOMINFO	MISI KOTA PEKALONGAN 2021-2026	PROG UNGGULAN KOTA PEKALONGAN 2021-2026
<p>komunikasi publik :</p> <p>4. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang infrastruktur dan statistik :</p> <p>5. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang aplikasi dan persandian :</p> <p>6. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan</p> <p>7. pengarahan dan pengkoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP);</p> <p>8. pengkoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan</p> <p>9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya</p>		

Faktor-faktor pendorong yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan Dinkominfo dalam upaya mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Kota Pekalongan antara lain:

- a. Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai pelayanan informasi publik utama Kota Pekalongan ;
- b. Lembaga yang memiliki kewenangan teknologi informasi dan komunikasi Kota Pekalongan dalam rangka peningkatan daya saing daerah;
- c. Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai pusat data dan informasi statistik sektoral Kota Pekalongan ;
- d. Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai koordinator penyelenggaraan persandian dan pengelolaan keamanan informasi Pemerintah Kota Pekalongan.

Sedangkan **faktor-faktor yang dapat menghambat** kinerja pelayanan Dinkominfo Kota Pekalongan dalam mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Kota Pekalongan antara lain:

- a. Pemenuhan layanan informasi publik belum optimal;
- b. Pemenuhan layanan SPBE (Layanan publik dan layanan adminis trasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang belum diimplementasikan secara elektronik;
- c. Peningkatan kematangan layanan jaringan intra Pemerintah Daerah ;
- d. Peningkatan penyediaan data statistik sektoral pada setiap OPD ;
- e. Pemenuhan Tingkat kematangan penerapan manajemen keamanan informasi belum optimal ;

Tabel 3.3.
Telaah Visi, Misi dan Program KDH.

NO	VISI/MISI/ PROGRAM KDH	TUPOKSI DINKOMINFO	PERMASALAHAN	FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG
1.	<p>Visi: <i>Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius</i></p> <p>Misi 7: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Governance dan Clean Government Program Unggulan No. 12: Penyediaan jaringan internet gratis;</p>	<p>1. perumusan dan penetapan sasaran, program bidang Komunikasi dan Informatika:</p> <p>2. perumusan kebijakan bidang Komunikasi dan Informatika :</p> <p>3. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang informasi dan komunikasi publik :</p> <p>4. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang infrastruktur dan statistik :</p> <p>5. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang aplikasi dan persandian :</p> <p>6. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan</p>	<p>10. Pemenuhan layanan informasi publik yang cepat.</p> <p>11. Pemenuhan layanan SPBE (Layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik</p> <p>12. Peningkatan kematangan layanan jaringan intra Pemerintah Daerah</p> <p>13. Peningkatan kematangan layanan</p>	<p>Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan layanan informasi publik belum optimal; • Pemenuhan layanan SPBE (Layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang belum diimplementasikan secara elektronik; • Peningkatan kematangan layanan jaringan intra Pemerintah Daerah ; • Peningkatan penyediaan data statistik sektoral pada setiap OPD ; • Pemenuhan Tingkat kematangan penerapan manajemen

NO	VISI/MISI/ PROGRAM KDH	TUPOKSI DINKOMINFO	PERMASALAHAN	FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG
		<p>7. pengarahan dan pengkoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP);</p> <p>8. pengkoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan</p> <p>9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya</p>	<p>jaringan intra Pemerintah Daerah</p> <p>14. Peningkatan penyediaan data statistik sektoral pada setiap OPD</p> <p>15. Tingkat kematangan penerapan manajemen keamanan informasi</p>	<p>keamanan informasi belum optimal ;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendorong: • Lembaga yang memiliki kewenangan teknologi informasi dan komunikasi Kota Pekalongan dalam rangka peningkatan daya saing daerah; • Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai pelayan informasi publik utama Kota Pekalongan ; • Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai pusat data dan informasi statistik sektoral Kota Pekalongan ; • Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai koordinator

NO	VISI/MISI/ PROGRAM KDH	TUPOKSI DINKOMINFO	PERMASALAHAN	FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG
				penyelenggaraan persandian dan pengelolaan keamanan informasi Pemerintah Kota Pekalongan.

3.3. Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga

3.3.1. Telaahan Renstra Kementrian Komunikasi dan Informatika

Tantangan dan potensi program Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rangka mendukung seluruh fokus pembangunan pemerintah Indonesia tahun 2015-2019, antara lain sebagai berikut:

7. Masih tingginya kesenjangan digital di wilayah Indonesia;
8. Kurangnya akses masyarakat terhadap informasi;
9. Belum terjangkau seluruh wilayah Indonesia dengan jaringan infrastruktur pitalebar (Palapa Ring);
10. Meningkatnya citra pemerintah di mata masyarakat versus turunnya kinerja pemerintah terkait hasil-hasil pembangunan;
11. Intoleransi dan krisis kepribadian bangsa.

Sedangkan tantangan dan potensi program *Universal Service Obligation* (USO) yang mendukung 4 (empat) fokus pembangunan pemerintah Indonesia, antara lain:

1. Keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi;
2. Kebutuhan akses internet untuk SMK/SMU;
3. Kebutuhan ketersediaan jaringan internet untuk informasi pertanian;
4. Kebutuhan radio keselamatan untuk nelayan.

Tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika meliputi fokus pembangunan bidang komunikasi dan informatika antara lain:

1. Mengelola sumber daya spektrum frekuensi radio secara optimal;
2. Mewujudkan tata kelola komunikasi dan informatika yang sehat, efisien dan aman;
3. Meningkatkan efisiensi industri komunikasi dan informatika;
4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi;

3.3.2. Telaahan Renstra Lembaga Sandi Negara / Badan Siber dan Sandi Nasional **Visi Lembaga Sandi Negara yaitu:**

Menjadi penyelenggara dan Pembina tunggal persandian Negara dalam menjamin keamanan informasi berklasifikasi milik pemerintah atau Negara serta menyajikan hasil pengupasan informasi bersandi guna turut serta menjaga keamanan nasional.

Untuk melaksanakan Visi Lemsaneg dan dalam rangka mendukung pencapaian visi-misi Presiden RI 2015-2019, Lemsaneg memiliki misi sebagai berikut:

1. Menyusun kebijakan nasional dalam bidang penyelenggaraan dan pembinaan persandian negara.
2. Mengelola system keamanan informasi berklasifikasi secara menyeluruh milik pemerintah atau Negara.
3. Melaksanakan kegiatan intelijen sinyal.
4. Menyelenggarakan rekayasa dan pengembangan teknologi persandian nasional.
5. Menyediakan dan mengoptimalkan sumber daya persandian melalui proses pembelajaran dan pertumbuhan yang didukung manajemen perkantoran secara transparan dan akuntabel.

Tujuan strategis Lemsaneg:

Sasaran strategis Setelah hasil reuiu menjadi 2 yaitu:

- d. Meningkatkan keamanan informasi nasional melalui persandian, dengan indikator kinerja:
 - a. Nilai penyelenggaraan persandian instansi pemerintah (K/L/D);

- b. Nilai Risk Assessment atas keamanan informasi instansi pemerintah (K/L/D).
- e. Meningkatnya deteksi dini ancaman terhadap keamanan nasional, dengan indikator kinerja: Nilai risiko yang dapat diantisipasi melalui saran tindak atau hasil analisis penyandian yang disampaikan kepada stakeholder.

Ancaman Keamanan Nasional Kemajuan yang sangat pesat di bidang teknologi informasi telah mengubah wajah dunia dan menggeser pemahaman terhadap arti kekuatan (*power*) suatu negara, sekaligus menunjukkan adanya difusi dalam pengertian pertahanan suatu negara. Kekuatan suatu Negara tidak lagi dinilai semata-mata dari seberapa besar kekuatan militer atau ekonomi yang dimiliki, tetapi juga tergantung dari penguasaan terhadap teknologi informasi. Kemajuan tersebut dibayangi oleh ancaman yang dapat merugikan bangsa, baik secara individu maupun kolektif sebagai bangsa, yang disebutnya sebagai *cyber attack*.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) telah menyatakan bahwa visi Pembangunan Nasional Republik Indonesia untuk tahun 2005–2025 adalah: Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur. Untuk mewujudkan visi tersebut, terdapat 8 (delapan) misi Pembangunan Nasional dan salah satunya adalah misi untuk mewujudkan “Indonesia yang Aman, Damai, dan Bersatu”, yang kemudian ditegaskan bahwa ”keamanan nasional diwujudkan melalui keterpaduan pembangunan pertahanan, pembangunan keamanan dalam negeri, dan pembangunan keamanan sosial yang diselenggarakan berdasarkan kondisi geografi, demografi, sosial, dan budaya serta berwawasan nusantara”

Berdasarkan Renstra Lemsaneg RI tahun 2013-2018 beberapa hal yang menjadi potensi yaitu sebagai berikut:

- 1) Fasilitas sarana dan prasarana yang memadai dan terkini yaitu laboratorium kriptografi, laboratorium elektronika, laboratorium pengkajian teknologi informasi, laboratorium sertifikasi peralatan sandi.

- 2) Pengamanan informasi berklasifikasi yang lebih beragam yaitu Informasi tidak lagi disampaikan dari *station to station* tetapi telah mengarah kepada *end-user computing*.
- 3) Penerapan e-Government menjadi tuntutan di mana teknologi informasi dan komunikasi akan memegang peran sentral dalam pengelolaan organisasi.

3.3.3. Telaahan Renstra Badan Pusat Statistik

Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2015-2019 telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 40 Tahun 2015. Dalam Renstra tersebut telah pula ditetapkan visi dari Badan Pusat Statistik yaitu “Pelopor Data Statistik Terpercaya untuk Semua”. Visi tersebut telah selaras dengan visi pembangunan nasional tahun 2015-2019 yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. sehingga visi BPS tersebut mengandung maksud bahwa BPS berupaya meningkatkan kontribusinya dalam hal pembangunan nasional di bidang statistik.

Rencana strategis BPS tahun 2015-2019 ini telah sejalan dengan upaya yang akan dilakukan Dinas komunikasi dan informatika dalam melaksanakan urusan statistik namun sesuai amanat undang-undang nomor 16 tahun 1997 tentang statistic kewenangan pemerintah daerah adalah di bidang statistic sektoral sedangkan BPS adalah statistic dasar. Upaya-upaya yang akan dilakukan dalam pelaksanaan urusan statistic oleh pemerintah daerah dibidang statistic sektoral adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan data dan informasi statistic.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. perkembangan

kebijakan daerah, dan kejadian bencana alam, berpotensi terjadinya perbedaan antara kondisi eksisting dengan rencana yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu harus dilakukan review terhadap RTRW Kota Pekalongan Rencana implementasi program dan kegiatan Dinkominfo Kota Pekalongan selama 5 (lima) tahun yang akan datang (Tahun 2021-2026) ada yang bersifat pembangunan fisik berupa pembangunan gedung Radio Kota Batik sehingga harus mempertimbangkan kebijakan-kebijakan pengaturan zonasi ataupun pemanfaatan ruang dalam dokumen RTRW Kota Pekalongan. Demikian pula terkait dengan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan dalam rangka penyusunan RPJMD Kota Pekalongan 2021-2026, tidak ditemukan indikasi program dan kegiatan di urusan Kominfo, Statistik, Persandian serta Fungsi Penunjang Pemerintahan yang akan berdampak strategis (besar) terhadap lingkungan hidup di Kota Pekalongan.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinkominfo adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam kinerja dan pelayanan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pada 5 (lima) tahun mendatang. Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi dan informatika Jawa Tengah jangka menengah, maka dapat ditetapkan isu strategis Dinkominfo Kota Pekalongan yaitu:

1. Fasilitasi teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung pelayanan publik belum optimal ;

2. Belum optimalnya kebutuhan pengembangan TIK dalam mewujudkan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Kota Pekalongan ;
3. Belum adanya muatan e-Government sesuai karakteristik daerah di Kota Pekalongan ;
4. Rendahnya kesadaran masyarakat Kota Pekalongan akan pentingnya statistik sektoral, informasi dan komunikasi;
5. Rendahnya capaian TIK dalam mewujudkan Digitalisasi Tata Kelola Keamanan Informasi Pemerintahan Kota Pekalongan ;

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN DINKOMINFO

d. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinkominfo Kota Pekalongan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi pembangunan jangka menengah selama Tahun 2021-2026 yaitu memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu yang meliputi : Rencana Induk SPBE Nasional; Arsitektur SPBE; Peta Rencana SPBE; rencana dan anggaran SPBE; Proses Bisnis; data dan informasi; Infrastruktur SPBE; Aplikasi SPBE; Keamanan SPBE; dan Layanan SPBE.

Tujuan tersebut menggunakan sasaran yang dijabarkan sebagai berikut:

2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap informasi publik
3. Meningkatnya Nilai Indeks Domain Tata Kelola SPBE setiap tahunnya
4. Meningkatnya kematangan layanan data terbuka
5. Meningkatnya indeks keamanan informasi

Keterkaitan serta indikator yang akan digunakan sebagai ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran, dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL KINERJA		TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap informasi publik	Persentase Pelayanan Informasi Publik	Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi pembangunan daerah	60	60	70	80	90	100	100	100
Indeks domain tata kelola SPBE	Tingkat kematangan pembangunan aplikasi SPBE	Persentase layanan SPBE (Layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	*3.14	2.75	2.85	2.95	3.05	3.15	3.16	3.16
	Tingkat kematangan layanan jaringan intra Pemerintah Daerah	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	49.43	55.21	58.79	60.61	62.42	64.24	66.06	66.06

Tingkat kematangan layanan data terbuka	Prosentase Perangkat Daerah yang menyediakan Data Statistik Sektoral	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	I	I	I	I	I	II	II	II
Indeks Keamanan Informasi		Persentase OPD yang menggunakan data statistik sektoral dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	2,93	2,93	3,06	3,20	3,33	3,46	3,60	3,60
	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan	Persentase Sistem Elektronik yang telah diamankan dengan sertifikat elektronik	I	I	I	I	I	II	II	II
		Persentase Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan								

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINKOMINFO

Strategi dan kebijakan Dinkominfo merupakan cara dan arah tindakan yang diambil guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dan kebijakan Dinkominfo dapat dilihat pada tabel 5.1.

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Nilai keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tingkat Kota	Meningkatnya layanan informasi publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase penyelesaian permohonan informasi publik 2. Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi pembangunan daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dokumen Raperda IKP 2. Meningkatkan pengelolaan website pekalongankota.go.id 3. Menfasilitasi Forum komunikasi Media Tradisional dan Kelompok informasi masyarakat 4. Mengadakan workshop RKB, Batik TV dan IKP 5. Menambah sarana prasarana IKP 6. Melayani jam siaran RKB dan Batik TV 7. Menfasilitasi KIP, MCAP, Sirkel 8. Menyediakan kerjasama media massa 9. Mengadakan lokarkaya manajemen komunikasi krisis 10. menyediakan layanan call center 24 jam 11. mengadakan jejak pendapat pemerintahan daerah

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Indeks SPBE	Meningkatnya tata kelola SPBE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi 2. Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dokumen sinkronisasi pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran 2. Menyusun dokumen kebijakan SPBE 3. Menambah peralatan DC dan DRC 4. Mengikutsertakan sertifikasi DC/DRC 5. Pengembangan operasionalisasi dan pemerliharaan Aplikasi SPB 6. Menyusun portal layanan publik dan Administrasi Pemerintahan 7. Memberikan fasilitasi kegiatan yang mendukung komunitas TIK 8. Mengadakan pelatihan TIK bagi ASN dan masyarakat 9. Mengadakan monitoring ekosistem SPBE 10. Mengadakan evaluasi ekosistem SPBE
	Tingkat kematangan layanan jaringan intra Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase unit kerja yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menambah titik jaringan Fiber Optic 2. Memelihara jaringan Batik Net 3. Menyediakan bandwidth internet untuk layanan Batik Net 4. Mengembangkan layanan operasionalisasi domain dan sub domain pemerintah Kota Pekalongan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Laju pemanfaatan data statistik sektoral	Tersedianya data statistik sektoral	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral 2. Jumlah dokumen data statistik sektoral yang disusun 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dokumen database indikator TIK 2. Menyusun dokumen data SDTD 3. Mengembangkan aplikasi satu data 4. Mencetak/mempublikasi data statistik sektoral
Indeks Keamanan Informasi	Terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem pemerintah berbasis elektronik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan 2. Persentase Sistem Elektronik yang telah diamankan dengan sertifikat elektronik 3. Persentase kelancaran pengiriman dan penerimaan naskah dinas melalui jaring komunikasi sandi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun kebijakan tata kelola dan manajemen keamanan informasi 2. Melakukan penilaian mandiri Indeks Keamanan Informasi 3. Mengadakan sosialisasi Keamanan Informasi 4. Mengusulkan lisensi sertifikat elektronik LS *.pekalongankota.go.id
Meningkatkan Tata Kelola Dinas Komunikasi dan Informatika	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan		<ol style="list-style-type: none"> f. Peningkatan perencanaan dan evaluasi yang komprehensif. g. Penguatan administrasi keuangan h. Penguatan administrasi kepegawaian i. Penguatan sistem administrasi umum dan kearsipan Penguatan sarana prasarana kantor

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja 2. Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 3. Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah 4. Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah 5. Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah 6. Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7. Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 8. Meningkatkan kapasitas SDM Dinas Komunikasi dan Informatika 9. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 10. Meningkatkan sistem administrasi umum dan keuangan serta kearsipan Dinas Komunikasi dan Informatika

Pada setiap arah kebijakan memiliki fokus pada setiap tahunnya. Selengkapnya untuk fokus tahunan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 5.2.

Tabel 5.2.

**Strategi dan Arah Kebijakan serta Fokus Tahunan Arah Kebijakan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan 2022-2026.**

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS KEBIJAKAN				
		2022	2023	2024	2025	2026
1. Persentase penyelesaian permohonan informasi publik	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun dokumen Raperda IKP Monitoring dan evaluasi 	0	1 Perda	1 perwal	1 dokumen tata kelola	0
		0	0	0	0	12 bulan
2. Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none"> Menyelenggarakan layanan call center 24 jam Menerima aduan masyarakat yang terlayani melalui Sp4N 	24 jam 24 jam	24 jam 24 jam	24 jam 24 jam	24 jam 24 jam	24 jam 24 jam
	<ul style="list-style-type: none"> MEngadakab seminar desiminasi mengadakan lokakarya sosialisasi desiminasi Menyusun dokumen analisis jejak pendapat 	1 kali 1 kali	1 kali 1 kali	1 kali 1 kali	1 kali 1 kali	1 kali 1 kali
		1 dokumen	0 dokum en	0 dokume n	0 dokumen	0 dokum en
	<ul style="list-style-type: none"> Mengadakan siaran RKN Mengadakan tayangan TV Batik Melakukan update domain pekalongankot a.go.id 	18 jam 10 jam 365 kali	18 jam 10 jam 365 kali	18 jam 10 jam 365 kali	18 jam 10 jam 365 kali	18 jam 10 jam 365 kali

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS KEBIJAKAN				
		2022	2023	2024	2025	2026
2. Persentase penyelesaian permohonan informasi publik	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun dokumen Raperda IKP Monitoring dan evaluasi 	0	1 Perda	1 perwal	1 dokumen tata kelola	0
		0	0	0	0	12 bulan
2. Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none"> Menyelenggarakan layanan call center 24 jam Menerima aduan masyarakat yang terlayani melalui Sp4N 	24 jam 24 jam	24 jam 24 jam	24 jam 24 jam	24 jam 24 jam	24 jam 24 jam
	<ul style="list-style-type: none"> MEngadab seminar desiminasi mengadakan lokakarya sosialisasi desiminasi Menyusun dokumen analisis jejak pendapat 	1 kali 1 kali 1 dokumen	1 kali 1 kali 0 dokum en	1 kali 1 kali 0 dokume n	1 kali 1 kali 0 dokumen	1 kali 1 kali 0 dokum en
	<ul style="list-style-type: none"> Mengadakan siaran RKN Mengadakan tayangan TV Batik Melakukan update domain pekalongankot a.go.id 	18 jam 10 jam 365 kali	18 jam 10 jam 365 kali	18 jam 10 jam 365 kali	18 jam 10 jam 365 kali	18 jam 10 jam 365 kali
3. Persentase penyelesaian permohonan informasi publik	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun dokumen Raperda IKP Monitoring dan evaluasi 	0	1 Perda	1 perwal	1 dokumen tata kelola	0
		0	0	0	0	12 bulan

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS KEBIJAKAN				
		2022	2023	2024	2025	2026
2. Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none"> Menyelenggarakan layanan call center 24 jam Menerima aduan masyarakat yang terlayani melalui Sp4N 	24 jam 24 jam	24 jam 24 jam	24 jam 24 jam	24 jam 24 jam	24 jam 24 jam
	<ul style="list-style-type: none"> Mengadakan seminar desiminasi mengadakan lokakarya sosialisasi desiminasi Menyusun dokumen analisis jejak pendapat 	1 kali 1 kali 1 dokumen	1 kali 1 kali 0 dokumen	1 kali 1 kali 0 dokumen	1 kali 1 kali 0 dokumen	1 kali 1 kali 0 dokumen
4. Persentase penyelesaian permohonan informasi publik	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun dokumen Raperda IKP Monitoring dan evaluasi 	0 0	1 Perda 0	1 perwal 0	1 dokumen tata kelola 0	0 12 bulan
	<ul style="list-style-type: none"> Mengadakan pameran Keterbukaan Informasi Publik Mengadakan siaran keliling Menyelenggarakan workshop / pelatihan KIP yang diselenggarakan 	1 kali 30 kali 2 kali	1 kali 30 kali 2 kali	1 kali 30 kali 2 kali	1 kali 30 kali 2 kali	1 kali 30 kali 2 kali
	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Publikasi melalui adventorial Liputan press conference 	3 kali 4 kali	3 kali 4 kali	3 kali 4 kali	3 kali 4 kali	3 kali 4 kali
	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah kegiatan pendampingan FK Metra yang dilakukan 	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS KEBIJAKAN				
		2022	2023	2024	2025	2026
	<ul style="list-style-type: none"> Menyediakan aplikasi call center 112 Menyelenggarakan FGD cc 112 Jumlah Pengelolaan pengaduan masyarakat 	3 aplikasi 3 kali 12 bulan	3 aplikasi 3 kali 12 bulan	3 aplikasi 3 kali 12 bulan	3 aplikasi 3 kali 12 bulan	3 aplikasi 3 kali 12 bulan
	<ul style="list-style-type: none"> Mengadakan press conference mengadakan press release mengadakan press room 	12 kali 12 kali 12 kali	12 kali 12 kali 12 kali	12 kali 12 kali 12 kali	12 kali 12 kali 12 kali	12 kali 12 kali 12 kali
Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi Persentase unit kerja yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo (IKK Output)	<ul style="list-style-type: none"> Mengadakan layanan Pengembangan dan Operasionalisasi Domain dan Subdomain Pemerintah Kota Pekalongan 	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
	<ul style="list-style-type: none"> Membangun titik jaringan berbasis Fiber Optic Mengadakan pemeliharaan jaringan batik Net Menyediakan bandwidth untuk jaringan Batik Net 	3 titik 12 bulan 1260 Mbps	3 titik 12 bulan 1270 Mbps	3 titik 12 bulan 1270 Mbps	3 titik 12 bulan 1270 Mbps	3 titik 12 bulan 1270 Mbps

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS KEBIJAKAN				
		2022	2023	2024	2025	2026
Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi Persentase unit kerja yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo (IKK Output)	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun dokumen Domain SPBE yang disusun 	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
	<ul style="list-style-type: none"> Menambah peralatan DC dan DRC Memelihara peralatan DC DRC DC/DR Mengadakan pelatihan pelayanan jaringan 	1 partrisi 12 Bulan 3 kali	0 unit 12 Bulan 3 kali	0 unit 12 Bulan 3 kali	0 unit 12 Bulan 3 kali	0 unit 12 Bulan 3 kali
	Mengadakan sosialisasi pengembangan aplikasi	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali
	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun portal layanan publik dan Administrasi Pemerintahan Memberikan fasilitasi kegiatan yang mendukung komunitas TIK 	1 aplikasi 2 kali	1 aplikasi 2 kali	1 aplikasi 2 kali	1 aplikasi 2 kali	1 aplikasi 2 kali
	Mengadakan pelatihan TIK bagi ASN dan masyarakat	8 kali	8 kali	8 kali	8 kali	8 kali
	Menyusun dokumen hasil monitoring ekosistem SPBE	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS KEBIJAKAN				
		2022	2023	2024	2025	2026
Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral Menyusun dokumen data statistik sektoral yang disusun	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan h dokumen indikator database TIK yang disusun Menyusun dokumen data SDTD Mengembangkan aplikasi satu data Mencetak/mempublikasi data statistiik sektor 	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
Persentase Sistem Elektronik yang telah diamankan dengan sertifikat elektronik	Menyusun kebijakan tata kelola dan manajemen keamanan informasi	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan penilaian mandiri Indeks Keamanan Informasi Mengadakan sosialisasi Keamanan Informasi Mengusulkan lisensi sertifikat elektronik LS * .pekalongankota.go.id mencetak leaflet promosi keamanan informasi mengadabnn lisensi Endpoint Security (Antivirus) yang dilaksanakan 	1 kegiatan 1 kegiatan 1 lisensi 4 leaflet 20 lisensi	1 kegiatan 1 kegiatan 1 lisensi 4 leaflet 20 lisensi	1 kegiatan 1 kegiatan 1 lisensi 4 leaflet 20 lisensi	1 kegiatan 1 kegiatan 1 lisensi 4 leaflet 20 lisensi	1 kegiatan 1 kegiatan 1 lisensi 4 leaflet 20 lisensi

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS KEBIJAKAN				
		2022	2023	2024	2025	2026
Persentase kelancaran pengiriman dan penerimaan naskah dinas melalui jaring komunikasi sandi	• Jumlah perangkat keamanan TIK khusus berupa peralatan sandi untuk Jaring Komunikasi Sandi Internal Pemerintah Daerah	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
	• Penyusunan laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang persandian	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
	• Jumlah naskah dinas yang dikirim / diterima melalui Jaring Komunikasi Sandi	74 artikel	76 artikel	78 artikel	80 artikel	80 artikel
	• Jumlah prosedur persandian	2 prosedur	2 prosedur	2 prosedur	2 prosedur	2 prosedur
Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	• Menyusun dokumen renja dan perubahan renja	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
	• Menyusun dokumen RKA dan perubahan RKA	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
	• Menyusun dokumen evaluasi renja yang disusun	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
	• Menyusun ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
	• Menyediaan gaji dan tunjangan menyediakan administrasi	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS KEBIJAKAN				
		2022	2023	2024	2025	2026
	keuangan <ul style="list-style-type: none"> Menyusun laporan SKPD Menyediakan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah 	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor penyediaan alat tulis kantor dan benda pos mengadakan peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan penyediaan makanan dan minuman penyediaan barang cetakan dan penggandaan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan Menfasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
		13 unit	15 unit	17 unit	19 unit	25 unit
		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS KEBIJAKAN				
		2022	2023	2024	2025	2026
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	• Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
	• Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
	• Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
	• Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
	• ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
	• Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
	• Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
	• Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN DINKOMINFO

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Pekalongan 2021-2026 melalui tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk 5 (lima) tahun mendatang.

Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan tersebut, maka Dinkominfo Kota Pekalongan menetapkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021-2026. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 6.1.

Tabel 6.1.
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun 2021-2023.

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026					
					2020	2021	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Meningkatnya kualitas Layanan Publik	Nilai Keterbukaan informasi publik tingkat Kota		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase penyelesaian permohonan informasi publik	100	0	100	4.754.037	100	4.961.257	100	5.973.917.	100	4.971.618.	100	4.770.442.	100	4.770.442.	Dinkominfo	
			Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi pembangunan Daerah	79.49	0	82	4.754.037	85	4.961.257	87	5.973.917.	90	4.971.618.	92	4.770.442.	92	4.770.442	Dinkominfo	
			Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik				0			78.278.	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinkominfo	
			Perda IKP (Informasi Komunikasi Publik)		0	0	0	0	1	78.278.	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinkominfo	
			Perwal IKP (Informasi Komunikasi)		0	0	0	0	0	0	1	75.000.	0	0	0	0	0	0	Dinkominfo	

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026						
					2020	2021	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
				Publik)																	
				Penyusunan Kebijakan dan Tata Kelola IKP	0	0	0	0	0	0	0	0	1	75.000.	0	0	0	0	Dinkominfo		
				Monitoring dan Evaluasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	50.000.	12	50.000.	Dinkominfo		
			Monitoring Opini dan Aspirasi Publik				25.000.		25.000.		25.000.		25.000.		25.000.		25.000.		25.000.	Dinkominfo	
				Jumlah Aduan Masyarakat yang Terlayani Melalui SP4N	0	0	12	25.000.	12	25.000.	12	25.000.	12	25.000.	12	25.000.	12	25.000.	Dinkominfo		
			Monitoring Informas Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah				0		0		0		0		0		0		0	Dinkominfo	
				Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				111.020.		116.000.		121.000.		126.000.		131.000.		131.000.	Dinkominfo		
				Jumlah Bulan Pengelolaan Ide	12	12	12	111.020.	12	116.000.	12	121.000.	12	126.000.	12	131.000.	12	131.000.	Dinkominfo		

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026					
					2020	2021	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Konten Website pekalongan.go.id																
			Pengelolaan Media Komunikasi Publik				2.971.532		3.027.929		4.023.447.		3.002.568.		2.808.892.		2.808.892.	Dinkominfo		
			Jumlah Jam Siaran RKB		18	18	18	825.139.	18	877.929.	18	1.825.000.	18	825.000.	18	825.000.	18	825.000.	Dinkominfo	
			Jumlah jam Tayangan Batik TV		9	9	10	2.146.393	11	2.150.000	12	2.198.447.	13	2.177.568.	13	1.963.892.	13	1.963.892.	Dinkominfo	
			Pelayanan Informasi Publik				387.000.		387.000.		387.000.		387.000.		387.000.		387.000.	Dinkominfo		
			Jumlah Layanan Internet Keliling yg diisenggarakan		0	40	40	40.000.	40	40.000.	40	40.000.	40	40.000.	40	40.000.	40	40.000.	Dinkominfo	
			Jumlah Penyelenggara Pameran KIP(Pekan Informasi Daerah)		0	1	1	317.000.	1	317.000.	1	317.000.	1	317.000.	1	317.000.	5	317.000.	Dinkominfo	
			Jumlah Siaran Keliling Mobil		0	30	30	30.000.	30	30.000.	30	30.000.	30	30.000.	30	30.000.	30	30.000.	Dinkominfo	

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026					
					2020	2021	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				M-Pustaka yang Dilaksanakan																
			Layanan Hubungan Media				855.935.		916.000.		924.000.		930.000.		935.000.		935.000.		Dinkominfo	
			Jumlah Advertorial yang dimuat di Media Massa dalam setahun		0	3	3	802.935.	3	860.000.	3	865.000.	3	870.000.	3	875.000.	15	875.000.	Dinkominfo	
			Jumlah Liputan Press Conference yang dilaksanakan		0	4	4	53.000.	4	56.000.	4	59.000.	4	60.000.	4	60.000.	20	60.000.	Dinkominfo	
			Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan					33.300.		33.300.		33.300.		33.300.		33.300.		33.300.	Dinkominfo	
			Jumlah Kegiatan Pendampingan FK Metra yang dilakukan		4	4	4	13.300.	4	13.300.	4	13.300.	4	13.300.	4	13.300.	4	13.300.	Dinkominfo	
			Jumlah Kegiatan Pendampingan KIM yang dilaksanakan		4	4	4	20.000.	4	20.000.	4	20.000.	4	20.000.	4	20.000.	4	20.000.	Dinkominfo	

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (5)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026					
					2020	2021	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Manajemen Komunikasi Krisis					348.250.		354.250.		360.170.		366.250.		372.250.		372.250.	Dinkominfo	
			Jumlah Aplikasi Call Center yang disewa		3	3	3	215.475.	3	215.475.	3	215.475.	3	215.475.	3	215.475.	3	215.475.	Dinkominfo	
			Jumlah FGD yang diselenggarakan		3	3	3	8.295.	3	8.295.	3	8.295.	3	8.295.	3	8.295.	3	8.295.	Dinkominfo	
			Jumlah Bulan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat		12	12	12	124.480.	12	130.480.	12	136.400.	12	142.480.	12	148.480.	12	148.480.	Dinkominfo	
			Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik					0		0		0		0		0		0	Dinkominfo	
			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas					22.000.		23.500.		25.000.		26.500.		28.000.		28.000.	Dinkominfo	
			Jumlah Press Conference yang diadakan		12	12	12	8.000.	12	8.500.	12	9.000.	12	9.500.	12	10.000.	12	10.000.	Dinkominfo	
			Jumlah Press Release yang		12	12	12	7.000.	12	7.500.	12	8.000.	12	8.500.	12	9.000.	12	9.000.	Dinkominfo	

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026					
					2020	2021	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				diadakan																
				Jumlah Press Room yang diadakan	12	12	12	7.000.	12	7.500.	12	8.000.	12	8.500.	12	9.000.	12	9.000.	Dinkominfo	
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0		0		Dinkominfo	
Mengoptimalkan Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Smart Governance)	Meningkatnya tata kelola SPBE		Program Aplikasi Informatika	Program : Indeks Aspek Teknologi Informasi dan komunikasi	n/a	0	2,90	3.529.012	3,00	2.841.561	3,10	2.669.145.	3,20	2.642.823.	3,30	2.707.336.	3,30	2.707.336.	Dinkominfo	
			Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh	Kegiatan : Persentase unit kerja yang menggunakan	55.15	0	58.79	2.338.787	60.61	1.621.336	62.42	1.689.920	64.24	1.681.598.	66.06	1.720.611.	66.06	1.720.611.	Dinkominfo	

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026					
					2020	2021	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Pemerintahan Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kab/Kota	akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo (IKK Output)																
			Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan : Jumlah bulan dalam layanan Pengembangan dan Operasionalisasi Domain dan Subdomain Pemerintah Kota Pekalongan		12 Bulan	12 Bulan	9.000	12 Bulan	9.500	12 Bulan	10.000	12 Bulan	10.000	12 Bulan	10.000	12 Bulan	10.000.	Dinkominfo	
			Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah					2.329.787		1.611.836		1.679.920		1.671.598		1.710.611.		1.710.611.	Dinkominfo	
				Sub Kegiatan : Jumlah titik jaringan	3 titik	3 titik	3 titik	497.600.	3 titik	500.000.	3 titik	500.000.	3 titik	500.000.	3 titik	500.000	15 titik	500.000.	Dinkominfo	

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026					
					2020	2021	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Batik.Net																
				Sub Kegiatan : Jumlah Bulan dilakukan pemeliharaan Jaringan Batik.Net	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	111.050.	12 Bulan	111.836.	12 Bulan	113.000.	12 Bulan	114.000.	12 Bulan	115.000.	12 Bulan	115.000.	Dinkominfo	
				Sub Kegiatan : Jumlah Kapasitas Bandwidth internet untuk layanan Batik.Net	1260 Mbps	1260 Mbps	1270 Mbps	1.721.137 .	1270 Mbps	1.000.000	1270 Mbps	1.066.920.	1270 Mbps	1.057.598.	17270 Mbps	1.095.611	17270 Mbps	1.095.611.	Dinkominfo	
			Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot a				1.190.225 .		1.220.225 .		979.225.		961.225.		986.725.		986.725.	Dinkominfo		
			Kegiatan : Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot a	Kegiatan : Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai peraturan perundang-undnagan (IKK	0,93	0	9,35 persen	1.190.225 .	9,35 persen	1.220.225 .	9,35 persen	979.225.	9,35 persen	961.225.	9,35 persen	986.725.	9,35 persen	986.725.	Dinkominfo	

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (5)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026					
					2020	2021	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Output)																
			Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Domain SPBE yang disusun	0	2 dokumen	2 dokumen	333.000.	2 dokumen	333.000.	1 dokumen	150.000.	1 dokumen	100.000	1 dokumen	100.000	1 dokumen	100.000.	Dinkominfo	
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Sub Kegiatan : Jumlah Monev Ekosistem SPBE yang dilaksanakan	0	0 Dokumen	3 Dokumen	30.000.	3 Dokumen	32.500.	3 Dokumen	35.000.	3 Dokumen	37.500.	3 Dokumen	40.000.	3 Dokumen	40.000.	Dinkominfo	
			Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah					99.000.		109.000.		129.000.		144.000.		150.000.		150.000.	Dinkominfo	
				Sub Kegiatan : Jumlah partisi ruang DC/DRC	0	0	1 partisi	26.000.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinkominfo	
				Sub Kegiatan : Jumlah capacity building tehnik pelayanan jaringan diselenggarakan	0	3 kali	3 kali	35.000	3 kali	35.000	3 kali	45.000	3 kali	50.000	3 kali	50.000	3 kali	50.000.	Dinkominfo	

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
					2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp. (000)		
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Sub Kegiatan : Jumlah bulan Pemeliharaan peralatan DC/DRC	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	38.000.	12 Bulan	74.000.	12 Bulan	84.000.	12 Bulan	94.000.	12 Bulan	100.000.	12 Bulan	100.000.	Dinkominfo	
			Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik				413.725.		425.725.		437.725.		449.725.		461.725.		461.725.	Dinkominfo		
			Sub Kegiatan : Jumlah Sosialisasi Pengembangan Aplikasi yang dilaksanakan	3	3	3	413.725.	3	425.725.	3	437.725.	3	449.725.	3	461.725.	3	461.725.	Dinkominfo		
			Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas				275.500		280.000.		185.000		185.000.		185.000.		185.000.	Dinkominfo		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026					
					2020	2021	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Sub Kegiatan : Jumlah Aplikasi Smartcity yang di beli	0	0	0		1	75.000	1	75.000	1	75.000	1	75.000.	1	75.000.	Dinkominfo	
				Sub Kegiatan : Jumlah Fasilitas kegiatan yang mendukung Komunitas TIK	0	2 kali	2 kali	100.000.	2kali	105.000.	2 kali	110.000.	2kali	110.000	2kali	110.000.	2 kali	110.000.	Dinkominfo	
				Sub Kegiatan: Jumlah aplikasi smartcity yang disewa	1	1	1	175.500.	1	100.000.	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinkominfo	
			Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Sub Kegiatan : Jumlah pelatihan TIK bagi ASN dan Masyarakat yang dilaksanakan	8 kali	8 kali	8 kali	39.000.	8 kali	40.000.	8 kali	42.500.	8 kali	45.000.	8 kali	50.000.	8 kali	50.000.	Dinkominfo	
			Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan	Sub Kegiatan : Jumlah money Ekosistem	0	0	3	30.000.	3	32.500.	3	35.000.	3	37.500.	3	40.000.	3	40.000.	Dinkominfo	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026					
					2020	2021	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Meningkatkan Pemanfaatan data statistik sektoral	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik		Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE yang dilaksanakan	SPBE yang dilaksanakan																
			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Program :Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral	100 persen	0	100 persen	115.166.	100 persen	111.423.	100 persen	109.027.	100 persen	107.494.	100 persen	109.120.	100 persen	109.120.	Dinkominfo	
			Kegiatan : Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan : Jumlah dokumen data statistik sektoral yang disusun	1	0	2 dokumen	115.166.	2 dokumen	111.423.	2 dokumen	109.027.	2 dokumen	107.494.	2 dokumen	109.120.	2 dokumen	109.120.	Dinkominfo	
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Sub Kegiatan : jumlah dokumen data statistik sektoral yang disusun	2	2	2	115.166.	2	111.423	2	109.027	2	107.494.	2	109.120.	2	109.120.	Dinkominfo	

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026					
					2020	2021	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Sub Kegiatan : jumlah dokumen data SDTD yang disusun		0 dokumen	1 dokumen	30.000	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0 dokumen	0	0	0 dokumen	0	Dinkominfo	
				Sub Kegiatan : jumlah aplikasi satu data yang dikembangkan		1 aplikasi	1 aplikasi	27.500	1 aplikasi	30.000	1 aplikasi	30.000	1 aplikasi	30.000	1 aplikasi	30.000	1 aplikasi	30.000	Dinkominfo	
				Sub Kegiatan : jumlah dokumen publikasi statistik yang dicetak		1 dokumen	1 dokumen	42.500	1 dokumen	70.000	1 dokumen	70.000	1 dokumen	70.000	1 dokumen	70.000	1 dokumen	70.000	Dinkominfo	
Mewujudkan keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem pemerintah berbasis elektronik	Terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem pemerintah berbasis elektronik		Program : Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi	Persentase sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan	0	0	1,87 persen	150.763.	2,8 persen	150.142.	2,8 persen	152.819.	3,74 persen	171.274.	3,74 persen	179.773.	3,74	179.773.	Dinkominfo	
			Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah	Kegiatan : Persentase Sistem Elektronik yang telah diamankan	0	0	9,35	122.763.	9,35	122.142.	9,35	124.819.	9,35	141.274.	9,35	149.773.	9,35	149.773.	Dinkominfo	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026					
					2020	2021	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Daerah Kabupaten/Kota	dengan sertifikat elektronik																
			Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan : Jumlah dokumen kebijakan tata kelola dan manajemen keamanan informasi yang disusun	0	2 dokumen	2 dokumen	15.000.	2 dokumen	15.000.	2 dokumen	15.000.	2 dokumen	15.000.	2 dokumen	16.227.	2 dokumen	16.227.	Dinkominfo	
			Sub Kegiatan: Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik					30.000.		30.000.		30.000.		30.000.		33.000		33.000.	Dinkominfo	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan	Sub Kegiatan : Jumlah penilaian	0	0 kegiatan	1 kegiatan	2.000.	1 kegiatan	2.000	1 kegiatan	2.000.	1 kegiatan	2.000	1 kegiatan	3.000.	1 kegiatan	3.000.	Dinkominfo	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026					
					2020	2021	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	mandiri Indeks Keamanan Informasi yang dilaksanakan																
				Sub Kegiatan : Jumlah sosialisasi Keamanan Informasi	0	1	1	7.800.	1	7.800.	1 kegiatan	7.800.	1	7.800.	1 kegiatan	9.800.	1 kegiatan	9.800.	Dinkominfo	
				Sub Kegiatan : Jumlah lisensi Sertifikat Elektronik TLS *.pekalongankota.go.id yang diadakan	0	0	1	6.500.	1 lisensi	6.500.	1 lisensi	6.500.	1 lisensi	6.500.	1 lisensi	6.500.	1 lisensi	6.500.	Dinkominfo	
1.				Sub Kegiatan : Jumlah lisensi Endpoint Security (Antivirus) yang dilaksanakan	0	0	20	12.500.	20	12.500.	20	12.500.	20	12.500.	20	12.500.	20 sntivirus	12.500.	Dinkominfo	
				Sub Kegiatan : Jumlah leaflet	0 rim	0 rim	4 rim	1.200.	4 rim	1.200.	4 rim	1.200.	4 rim	1.200.	4 rim	1.200.	4 rim	1.200.	Dinkominfo	

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026					
					2020	2021	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				promosi keamanan informasi																
			Sub Kegiatan: Penyediaan Layanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten? Kota					77.763.		77.142.		79.819.		96.274.		100.546.		100.546.	Dinkominfo	
		Sub	Kegiatan : Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan : Audit TIK yang dilaksanakan	0	0	2	27.763.	1	27.142.	1	29.819.	1	46.274.	1	50.546.	1	50.546.	Dinkominfo	
				Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Pelatihan Teknis keamanan informasi dan Teknologi Informasi yang	0	0	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000.	Dinkominfo	

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
					2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp. (000)		
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				dilaksanakan																
			Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan : Persentase kelancaran pengiriman dan penerimaan naskah dinas melalui jaring komunikasi sandi	100	0	100 Persen	28.000.	100 Persen	28.000.	100 Persen	28.000.	100 Persen	30.000.	100 Persen	30.000.	100 Persen	30.000.	Dinkominfo	
		Sub	Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan : Jumlah perangkat keamanan TIK khusus berupa peralatan sandi untuk Jaring Komunikasi Sandi Internal Pemerintah Daerah	0	2 unit	2 unit	20.000	2 unit	20.000	2 unit	20.000	2 unit	20.000	2 unit	20.000	10 unit	20.000.	Dinkominfo	
				Sub Kegiatan : Penyusunan laporan penyelenggara	0	1 dokumen	1 dokumen	1.500	1 dokumen	1.500	1 dokumen	1.500	1 dokumen	1.500	1 dokumen	1.500	5 dokumen	1.500.	Dinkominfo	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026					
					2020	2021	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				n urusan pemerintahan bidang persandian																
				Sub Kegiatan : Jumlah naskah dinas yang dikirim / diterima	0	74 surat	74 surat	2.500.	76 surat	2.500.	78 surat	2.500.	80 surat	4.500.	80 surat	4.500.	80 surat	4.500.	Dinkominfo	
				Sub Kegiatan : Jumlah prosedur persandian	0	2 dokumen	2 dokumen	4.000	2 dokumen	4.000	2 dokumen	4.000	2 dokumen	4.000	2 dokumen	4.000	2	4.000.	Dinkominfo	
	Non urusan							4.626.602		4.728.429		4.791.045.		4.862.377.		6.142.934.		6.142.934.	Dinkominfo	
1.	1.		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					4.626.602		4.728.429		4.791.045		4.862.377.		6.142.934.		6.142.934.	Dinkominfo	
Indeks Kepuasan	Meningkatnya		Program Penunjang	Program : Persentase	100	0	100	3.260.352	100	3.313.762	100	3.334.479.	100	3.366.610.	100	3.492.521.	100	3.492.521.	Dinkominfo	

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026					
					2020	2021	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
masyarakat	akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah		Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	ketersediaan laporan capaian kinerja																
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					35.750.		35.750.		35.750		35.750.		135.000.		135.000.	Dinkominfo	
		Kegiatan	; Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kegiatan : Persentase ketercapaian perencanaan penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	0	0	100 persen	1.108.250 .	100 persen	1.108.250 .	100 persen	1.108.250.	100 persen	1.108.250.	100 persen	4.185.000.	100 persen	4.185.000.	Dinkominfo	
		Sub	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan : Jumlah dokumen renja dan perubahan renja yang disusun	0	2	2	10.750.	2	10.750.	2	10.750.	2	10.750.	2	110.000.	2	110.000.	Dinkominfo	
		Sub	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan	Sub Kegiatan : Jumlah dokumen RKA	0	2	2	1.500.	2	1.500.	2	1.500.	2	1.500.	2	1.500.	2	1.500.	Dinkominfo	

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026					
					2020	2021	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Dokumen RKA-SKPD	dan perubahan RKA yang disusun					n		en			n		en				
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					23.500.		23.500.		23.500.		23.500.		23.500.		23.500.		Dinkominfo
		Sub	Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Kegiatan : Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun	0	2 dokumen	2 dokumen	23.500.	2 dokumen	23.500.	2 dokumen	23.500.	2 dokumen	23.500.	2 dokumen	23.500.	10 dokumen	23.500.		Dnkominfo
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3.224.602		3.278.012		3.298.729.		3.330.860.		3.357.521.		3.357.521.		Dinkominfo
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan : Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	0	0	100	96.789.560.	100	98.401.860.	100	99.023.370	100	99.987.300.	100	100.787.130.	100	100.787.130.		Dinkominfo
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					3.173.102		3.216.512		3.237.229.		3.269.360.		3.296.021.		3.296.021.		Dinkominfo

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026					
					2020	2021	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		Sub	Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN		12 Bulan	12 Bulan	3.173.102	12 Bulan	3.216.512	12 Bulan	3.237.229.	12 Bulan	3.269.360.	12 Bulan	3.296.021.	12 bulan	3.296.021.	Dinlominfo	
		Sub	kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	0	12 Bulan	12 Bulan	50.000.	12 Bulan	60.000.	12 Bulan	60.000.	12 Bulan	60.000.	12 Bulan	60.000.	12 bulan	60.000.	Dinkominfo	
		Sub	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sub Kegiatan : jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun	0	2	2 dokumen	1.500.	2 dokumen	1.500.	2 dokumen	1.500.	2 dokumen	1.500.	2 dokumen	1.500.	2 dokumen	1.500.	Dinkominfo	
				Indikator Program : Persentase ketersediaan layanan administrasi	100	0	100	962.519.	100	961.454.	100	1.004.743.	100	1.041.337.	100	1.065.457.	100	1.065.457.	Dinkominfo	

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026					
					2020	2021	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah																
			Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					9.500.		10.075.		10.380.		10.700.		11.000.		11.000.	Dinkominfo	
			Kegiatan : Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian PD		0	0	100 persen	285.000	100 persen	302.250	100 persen	311.400	100 persen	321.000.	100 persen	330.000	100 persen	330.000.	Dinkominfo	
			Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Sub Kegiatan : jumlah keikutsertaan dalam pameran hakteknas dan karnaval batik	0	2	2 event	9.500.	2 event	10.075.	2 event	10.380.	2 event	10.700.	2 event	11.000.	6 event	11.000.	Dinkominfo	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah					447.719		402.589.		430.763.		465.937.		486.757.		486.757.	Dinkominfo	

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026					
					2020	2021	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	0	0	100 persen	13.535.570.	100 persen	12.182.670.	100 persen	13.048.711.	100 persen	14.127.457.	100 persen	14.766.467.	100 persen	14.766.467.	Dinkominfo	
		Sub	Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor				5.000.		5.300.		5.450.		5.600.		6.000.		6.000.	Dinkominfo		
				Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0	12 Bulan	12 Bulan	5.000	12 Bulan	5.300	12 Bulan	5.450	12 Bulan	4.600	12 Bulan	6.000	12 bulan	6.000.	Dinkominfo	
				Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				167.179.		111.500.		114.760.		118.000.		120.000.		120.000.	Dinkominfo	
				Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan	0	12 Bulan	12 Bulan	85.658.	12 Bulan	85.000.	12 Bulan	87.500.	12 Bulan	90.000	12 Bulan	90.000	12 bulan	90.000.	Dinkominfo	

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
					2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp. (000)		
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				benda pos																
				Sub Kegiatan : jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	0	13 unit	15 unit	81.521.	17 unit	26.500	19 unit	27.260.	25 unit	28.000	30 unit	30.000	30 unit	30.000.	Dinkominfo	
		Sub	Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman		12 Bulan	12 Bulan	116.000	12 Bulan	123.000	12 Bulan	126.500	12 Bulan	130.500	12 Bulan	131.000	12 bulan	131.000.	Dinkominfo	
		Sub	Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan		12 Bulan	12 Bulan	41.600	12 Bulan	43.000	12 Bulan	43.000.	12 Bulan	46.800.	12 Bulan	50.000	12 bulan	50.000.	Dinkominfo	
		Sub	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan		12 Bulan	12 Bulan	13.940	12 Bulan	14.789	12 Bulan	15.232	12 Bulan	15.690	12 Bulan	16.000.	12 bulan	16.000.	Dinkominfo	
		Sub	Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Sub Kegiatan : Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan	0	200 orang kali	250 orangkali	104.000.	250 orangkali	105.000.	250 orangkali	125.821.	250 orangkali	149.347.	250 orangkali	163.757.	250 orangkali	163.757.	Dinkominfo	

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026							
					2020	2021	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
			Konsultasi SKPD b.	koordinasi luar daerah																		
			Kegiatan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				505.300.		548.790.		563.600.		564.700.		567.700.		567.700		Dinkominfo			
				Kegiatan : Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	100 persen	15.061.10 0.	100 persen	16.359.91 0.	100 persen	16.802.000 ..	100 persen	16.834.000.	100 persen	16.921.000.	100 persen	16.921.000.		Dinkominfo		
			Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat c.	Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	0	12 Bulan	12 Bulan	2.400	12 Bulan	2.500	12 Bulan	2.600	12 Bulan	2.700	12 Bulan	2.700	12 bulan	2.700.		Dinkominfo		
			Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				405.000.		442.500.		455.000.		455.000.		455.000.		455.000.		455.000.		Dinkominfo	

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026					
					2020	2021	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik d.	Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0	12 Bulan	12 Bulan	405.000	12 Bulan	442.500	12 Bulan	455.000	12 Bulan	455.000	12 Bulan	455.000	12 bulan	455.000.	Dinkominfo	
	1.		Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					97.900.		103.790.		106.000.		107.000.		110.000		110.000.	Dinkominfo	
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor		12 Bulan	12 Bulan	97.900	12 Bulan	103.800	12 Bulan	106.000	12 Bulan	107.000	12 Bulan	110.000	12 bulan	110.000.	Dinkominfo	
				Program :Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	0	100 persen	403.731.	100 persen	453.213.	100 persen	451.823.	100 persen	454.430.	100 persen	1.584.956.	100 persen	1.684.968.	Dinkominfo	
			Kegiatan	Kegiatan :	0	0	100	11.933.93	100	13.376.39	100	13.334.690	100	13.408.900.	100	45.038.768.	100	45.038.768.	Dinkominfo	

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026					
					2020	2021	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			persen	0.	persen	0.	persen	.	persen		persen		persen			
			Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sub Kegiatan : Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala		27 unit	27 unit	197.820.	27 unit	208.600.	27 unit	210.000.	27 unit	210.000.	27 unit	220.000	27 unit	220.000.	Dinkominfo	
			Sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan : Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	0	3 gedung	3 gedung	89.000.	3 gedung	110.000.	3 gedung	110.000.	3 gedung	112.000.	3 gedung	1.254.956.	3 gedung	1.254.956.	Dinkominfo	

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026					
					2020	2021	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub kegiatan Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	0	12 Bulan	12 Bulan	116.911.	12 Bulan	134.613.	12 Bulan	131.823.	12 Bulan	132.430.	12 Bulan	110.000	12 Bulan	110.000.	Dinkominfo	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN DINKOMINFO

Definisi indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan (BPKP, 2000). Sementara menurut Lohman (2003), indikator kinerja (performance indicators) adalah suatu variabel yang digunakan untuk mengekspresikan secara kuantitatif efektivitas dan efisiensi proses atau operasi dengan berpedoman pada target-target dan tujuan organisasi. Jadi jelas bahwa indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu.

Indikator kinerja yang didukung oleh suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data yang kinerja yang memadai, akan dapat memberikan arah organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Indikator kinerja sebenarnya tidak hanya dapat digunakan pada saat penyusunan laporan pertanggungjawaban saja, namun indikator kinerja juga dapat menjadi komponen yang sangat penting pada saat perencanaan kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan saran dalam rancangan awal RPJMD.

Tabel TC.28
Penetapan Indikator Kinerja Utama
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan
Tahun 2021-2026

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KONDISI AWAL KINERJA		TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR PADA AKHIR RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi pembangunan daerah	60	60	70	80	90	100	100	100
2.	Persentase layanan SPBE (Layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	*3.14	2.75	2.85	2.95	3.05	3.15	3.16	3.16
3.	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	49.43	55.21	58.79	60.61	62.42	64.24	66.06	66.06
4.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	I	I	I	I	I	II	II	II
	Persentase OPD yang menggunakan data statistik sektoral dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	2,93	2,93	3,06	3,20	3,33	3,46	3,60	3,60
	Persentase Sistem Elektronik yang telah diamankan dengan sertifikat elektronik	I	I	I	I	I	II	II	II

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) PD merupakan panduan kerja bagi PD selama 5 (lima) tahun ke depan. Renstra disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih untuk dapat digunakan dalam mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 mendukung pencapaian dalam perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan yang baru terbentuk sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan telah menyusun dokumen ini sebagai acuan penyusunan rencana kerja tahunan. Namun berdasarkan Peraturan Daerah mengalami perubahan dalam Peraturan Walikota Pekalongan yang terakhir Nomor 79 Tahun 2020 tentang Kedudukan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada tahun 2020 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026. Dokumen renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya;

2. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam rencana kerja tahunan;
4. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja 5 (lima) tahun yaitu tahun 2022, 2023, 2024, 2025 dan 2026, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota periode 2021-2026 sesuai dengan tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan.

Program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra ini harus dapat dicapai dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, sehingga seluruh komponen organisasi harus ikut terlibat dan bertanggungjawab dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu sumber daya manusia merupakan komponen organisasi yang sangat vital dan berfungsi sebagai penentu utama dalam mencapai tujuan yang harus dikelola secara profesional dan proporsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan dan prosedur yang tepat. Apabila terjadi perubahan atau adanya keterbatasan, maka program/kegiatan dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan atau kebijakan yang berlaku.